

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



oleh :

Nama : Dewangga Eko Presetyo

NIM : 06312019

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat sarjana strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia

oleh

Nama : Dewangga Eko Prasetyo

NIS : 06312019

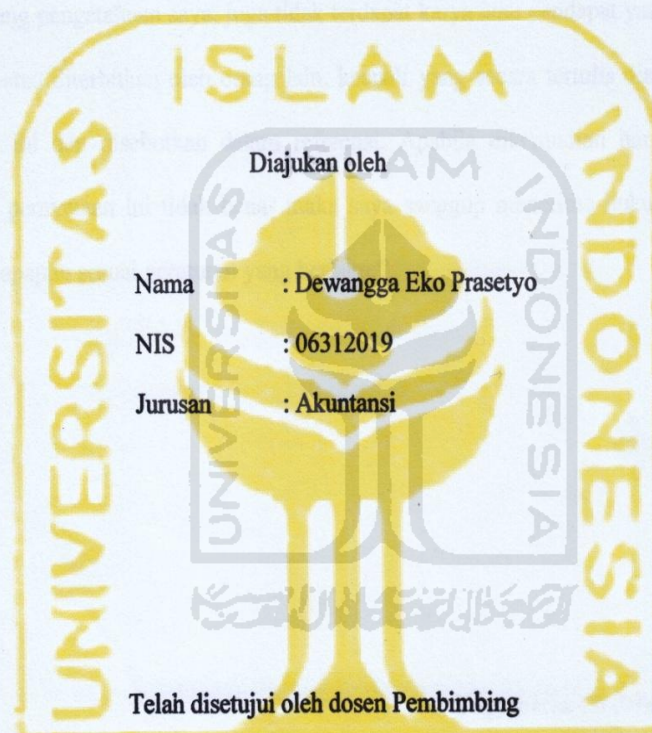
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

Hasil Penelitian



Diajukan oleh

Nama : Dewangga Eko Prasetyo

NIS : 06312019

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....

Dosen Pembimbing,



Marfuah Dra.,M.Si.,Ak.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Disusun Oleh: DEWANGGA EKO PRASETYO

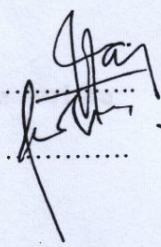
Nomor Mahasiswa: 06312019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada tanggal : 13 April 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Dra. Marfuah, M.Si, Ak

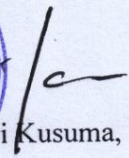
Penguji : Rifqi Muhammad, SE, M.Sc, SAS



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA



Pernyataan Bebas Plagiarisme

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 Februari 2012

Penyusun,



Dewangga Eko Prasetyo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur aku panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga atas seizinNya, akhirnya saya dapat menyelesaikan hasil karya tulis ilmiah yang tersusun dalam setiap lembaran skripsi ini.

Dan saya menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang begitu berarti disekeliling kita, yang dengan tulus memberikan cinta dan kasih sayangnya. Untuk itu kupersembahkan hasil karya ini pada :

Ibunda Sulistyowati & Ayahanda Lambang Prasetyo.

Adik - adik tersayang “Bayunanta Dwi Prasetyo & Irwansyah Tri Prasetyo”

Keluarga Besarku, dan saudara-saudaraku yang saya cintai yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Teman spesial yang selalu mendukung dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini Yeni Setia Rini.

Juga untuk teman – teman, anak kos Anindyo Danil, Fiori, Bogel, Agus, Agung, Andri, Fiko dan Putra yang selama ini telah mendukungku dan memberi semangat.

MOTTO

“Kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan, karena kegigihan lah yang bisa menyingkirkan rintangan rintangan besar.”

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena segala sesuatu hal berawal dari mencoba sampai akhirnya akan semakin tertempa untuk mampu menyelesaikan segala macam masalah yang dihadapi.”

“Berbuat lah sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini karena kita tidak tahu bagaimana hari esok.”

“Belajarlah dari pengalaman, kekecewaan dan penderitaan karena itu semua dapat mengubah orang biasa menjadi orang luar biasa maka tetap tersenyumlah jika smuanya terjadi.”

“Kebohongan satu akan melahirkan banyak kebohongan lain, maka dari itu jujur lah meski itu menyakitkan.”

“Berbahagialah dengan hal-hal sederhana dan tetap teguh jika yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT pemilik dari segala ilmu pengetahuan dan penguasa alam semesta serta isinya, shalawat serta salam bagi nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau. Atas berkat rahmat, hidayah serta kebesaran-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA IS ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, MA. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan studi dan menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Marfuah Dra.,M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala bimbingannya dan kesabarannya.

4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Beliau yang saya hormati Ayahanda Lambang Prasetyo, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, dengan sepenuh hati dan tanpa rasa lelah senantiasa membahagiakan keluarga, semoga skripsi ini dapat menjadi persembahanku atas segala fasilitas belajar yang telah Ayahanda berikan, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan kasih sayangNya yang tiada henti kepada Ayahanda.
6. Ibunda Sulistyowati tercinta atas kasih sayang dan do'a restu sepanjang waktu yang selalu mengiringi langkahku. Terima kasih banyak atas segala kebaikan hati ibunda tercinta, terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati yang paling dalam atas semua pengorbanan yang telah ibunda lakukan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan perlindunganNya kepada Ibunda atas segala kebaikan Ibunda selama ini.
7. Adikku tersayang Bayunanta Dwi Prasetyo dan Irwansyah Tri Prasetyo terima kasih selama ini telah memberikan dorongan, semangat, dan doanya.
8. Teman spesial Yeni Seti Rini terima kasih karena salalu mengingatkan untuk selalu mengerjakan skripsi dan selalu menemani, mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta anak kos Anindyo Danil, Fiori, Bogel, Putra, Andri, Agung, Fiko, Agus (terima kasih banyak telah membantu meskipun

tidak secara langsung, dan untuk bantuannya menyelesaikan tiap masalah yang ada saat pembuatan skripsi).

10. AA 5674 NE yang selalu menemaniku dari SMU sampai saya kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Akuntansi 2006, terima kasih .banyak.
12. Semua pihak yang telah membantu hingga tersusunlah skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Tiada dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih semoga Allah SWT yang akan senantiasa memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran & kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah Khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi.

Yogyakarta, 26 Pebruari 2012

Penulis,

Dewangga Eko Prasetyo

DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i>	<i>ii</i>
<i>Halaman Pengesahan</i>	<i>iii</i>
<i>Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme</i>	<i>iv</i>
<i>Halaman Persembahan</i>	<i>v</i>
<i>Halaman Motto</i>	<i>vi</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>vii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>x</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>xiv</i>
<i>Daftar Lampiran</i>	<i>xv</i>
<i>Abstrak</i>	<i>xvi</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. <i>Latar Belakang Masalah</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Rumusan Masalah</i>	<i>5</i>
1.3. <i>Tujuan Penelitian</i>	<i>5</i>
1.4. <i>Manfaat Penelitian</i>	<i>5</i>
1.5. <i>Sistematika Penelitian</i>	<i>6</i>
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>8</i>
2.1. <i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>9</i>
2.2. <i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>11</i>
2.2.1. <i>Pajak Daerah</i>	<i>12</i>
2.2.2. <i>Pajak Provinsi</i>	<i>12</i>

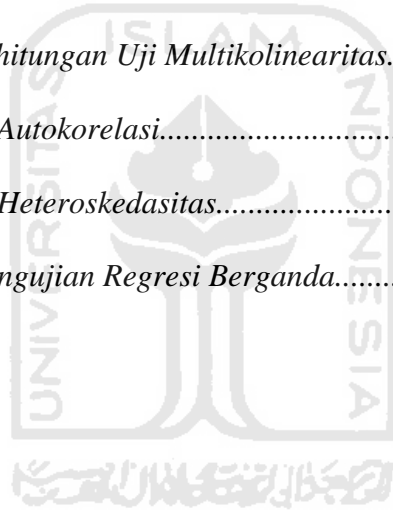
2.2.3. Pajak Kabupaten/Kota.....	13
2.2.4. Retribusi Daerah.....	15
2.2.4.1. Retribusi Jasa Umum.....	13
2.2.4.2. Retribusi Jasa Usaha.....	14
2.2.4.3. Retribusi Perijinan Tertentu.....	15
2.2.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	16
2.2.6. Lain-lain PAD yang Sah.....	17
2.3. Dana Alokasi Umum.....	17
2.4. Belanja Modal.....	19
2.5. Hipotesis Penelitian.....	22
2.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	22
2.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal....	23
2.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Populasi Penelitian.....	28
3.2. Sampel Penelitian.....	28
3.3. Jenis Data.....	28
3.4. Teknik Pengumpulan.....	28
3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	28
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	29
3.5.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
3.5.3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	30

3.5.4. <i>Belanja Modal</i>	30
3.6. <i>Hipotesis Operasional</i>	31
3.6.1. <i>Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal</i>	31
3.6.2. <i>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal</i>	31
3.6.3 <i>Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal</i>	31
3.7. <i>Metode Analisa Data</i>	32
3.7.1. <i>Analisis Deskriptif</i>	32
3.7.1.1. <i>Rata – rata</i>	32
3.7.1.2. <i>Standar Deviasi</i>	32
3.7.1.3. <i>Maximum</i>	33
3.7.1.4. <i>Minimum</i>	33
3.7.2. <i>Uji Asumsi Klasik</i>	33
3.7.2.1. <i>Normalitas</i>	33
3.7.2.2. <i>Multikolinearitas</i>	34
3.7.2.3. <i>Autokorelasi</i>	34
3.7.2.4. <i>Heteroskedastisitas</i>	34
3.7.3. <i>Uji Hipotesis</i>	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. <i>Diskripsi Data Penelitian</i>	37
4.1.1. <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	38
4.1.2 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	40

4.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	41
4.1.4. Belanja Modal.....	42
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.1. Normalitas.....	44
4.2.2. Multikolinearitas.....	44
4.2.3. Autokorelasi.....	45
4.2.4. Heteroskedastisitas.....	46
4.3. Analisis Regresi Berganda.....	46
4.4. Pengujian Hipotesis.....	48
4.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap Belanja Modal.....	48
4.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal.....	49
4.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Belanja Modal.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	52
5.3. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 4.1 Tabel Data Variabel Penelitian Wilayah Provinsi DIY.....</i>	37
<i>Tabel 4.2 Tabel Variabel PDRB Daerah di DIY.....</i>	39
<i>Tabel 4.3 Tabel Variabel PAD Daerah di DIY.....</i>	40
<i>Tabel 4.4 Tabel Variabel DAU Daerah di DIY.....</i>	42
<i>Tabel 4.5 Tabel Variabel Belanja Modal Daerah di DIY.....</i>	43
<i>Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji Normalitas.....</i>	44
<i>Tabel 4.7 Tabel Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas.....</i>	45
<i>Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji Autokorelasi.....</i>	45
<i>Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Heteroskedasitas.....</i>	46
<i>Tabel 4.10 Tabel Hasil Pengujian Regresi Berganda.....</i>	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. *Data Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DIY.*
2. *Data Mentah PDRB,PAD,DAU, dan Belanja Modal.*
3. *Data Lampiran Hasil Regresi Berganda dan Uji Asumsi Klasik.*



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

ABSTRAK

Berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan tersebut menyebabkan daerah untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan sumber data yang cukup potensial bagi setiap daerah, salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah adalah berupa PDRB, PAD, dan DAU.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota se-Provinsi DIY yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan kota Yogyakarta dengan data laporan realisasi anggaran tahun 2005-2010.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa PDRB, PAD, dan DAU terbukti berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya Belanja Modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah mengikuti besarnya tiga variabel tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen pemerintahan di Indonesia memasuki era baru seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, karena sejak tahun tersebut telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pola pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik di masa Orde Baru yang diterjemahkan melalui Undang – Undang No 5 tahun 1974, telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi, dimanifestasikan melalui dasar hukum Undang - Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang – Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam perkembangan kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU. No. 32 tahun 2004 dan UU. No. 33 tahun 2004). Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya “kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas

maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke Daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan :

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dengan adanya peningkatan pelayanan publik di era desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Dalam desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). DAU adalah dana hibah murni yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima.

Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak (misal: membayar pajak atau retribusi) yang berimbang pada peningkatan PAD.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi menunjukkan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1955), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2001; Wong, 2004). Dan juga hasil penelitian David dan Adi (2007) yang berjudul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita” menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian-penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mulia Andirfa (2009) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.” yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan analisis di atas maka peneliti ini diberi judul :

“ PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang perlu diteliti adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Pemerintah

Hasil penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal ini diharapkan

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan di periode mendatang.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan informasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal yang terjadi di Provinsi DIY.

1.5 SISTEMATIS PEMBAHASAN

Terdiri dari beberapa kerangka materi untuk menyusun penelitian ini. Adapun kerangka tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

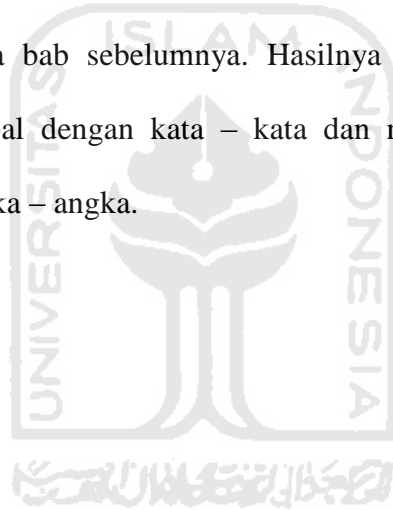
Berisi bahasan yang menjadi orientasi atau dasar teori bagi penelitian yang akan dilakukan dengan cara studi pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini melaporkan tentang teknik dan pengambilan data, populasi dan sampel, pengolahan data antara lain mengenai cara pengolahan data, rumus yang dipakai, dan kriteria dalam menarik kesimpulan.

BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan pengklasifikasian, penafsiran atau pengolahan data dengan cara yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya. Hasilnya disajikan dalam bentuk verbal dengan kata – kata dan matematis dalam bentuk angka – angka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang variabel – variabel penelitian, adapun variabel – variabel yang akan dijelaskan antara lain :

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstanta pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Sumber utama pertumbuhan juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Ditengah kesulitan pengerahan sumber – sumber dana investasi, maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perekonomian perlu terus diupayakan peningkatannya guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya.

Menurut Paul A Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP

potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yaitu, sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan inovasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembanguna ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah kurun waktu satu tahun. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor – sektor perekonomian daerah, yaitu :

- Pertanian, perikanan dan kelautan

- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Listrik, gas dan air bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, hotel dan restoran
- Angkutan dan komunikasi
- Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- Jasa – jasa

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Modal Daerah ayat 1 berbunyi " Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan “. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “ Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial “, tetapi dalam prakti penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003;

Mauro, 1988; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*.

Menurut Tadaro (1997) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, faktor tersebut adalah :

- Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- Kemajuan teknologi.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu ciri dari kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangannya. Untuk itu, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai

pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD dapat bersumber dari:

2.2.1 Pajak daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah (Mardiasmo, 2003). Berikut ini diuraikan hal-hal pokok mengenai pengaturan pajak daerah yang diolah berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001. Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam :

2.2.2 Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah (tingkat I) sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2.2.3 Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah (tingkat II) sebagai bagian dari pendapatan kabupaten/walikota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Pajak parkir.

2.2.4 Retribusi daerah.

Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mulyana, subhan dan slamet, 2006).

Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

2.2.4.1 Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2.2.4.2 Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Sedangkan subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2.2.4.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek

2.2.5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara yang pemerintahnya juga menjalankan fungsi-fungsi penyediaan barang-barang nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN/BUMD atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

- Bagian laba dari perusahaan daerah
- Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah)
- Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.2.6 Lain-lain PAD yang sah.

Selain jenis-jenis PAD di atas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintahan
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Dana alokasi umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah yang berperan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah (equalization grant), dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Berkaitan dengan itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, formula yang digunakan dalam perhitungan DAU adalah konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri (PDN) bersih, dengan rincian 10 persen untuk provinsi, dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Untuk meningkatkan fungsi utama DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, maka penerapan formula DAU sejak tahun 2003 – 2005 dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2004 alokasi DAU ditingkatkan, yaitu dari 25 persen menjadi 25,5 persen dari PDN bersih.
2. Formula yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan.
3. Tetap mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi minimum/alokasi dasar), yang terdiri dari lumpsum dan proporsional terhadap kebutuhan belanja pegawai.
4. DAU bagi daerah otonom baru (pemekaran) dihitung secara proporsional dari daerah induknya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja PNS daerah.

Berdasarkan konsep celah fiskal, alokasi/distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dalam pasal 45 PP 55/2005 dinyatakan bahwa Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; Daerah yang

memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar; Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal; Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Formula DAU dalam PP 55/2005, seperti yang dijelaskan di atas, digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan Dana Penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

2.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Di dalam keputusan menteri No. 29/ 2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat) Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja berupa Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Sementara belanja pelayanan publik adalah bagian belanja berupa, Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja pembangunan/modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor,

alat-alat rumah tangga, alat-alat studio, belanja modal alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam setiap menyusun anggaran belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung kantor yang baru dan direnovasi sedapat mungkin ditunda. Penggunaan dana lebih diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemulihan kondisi ekonomi serta pembukaan lapangan kerja. Apabila sangat mendesak dimungkinkan untuk sewa gedung.
2. Pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk antar jemput pegawai dan pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, dan untuk kendaraan sejenis lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk kepentingan operasional legislatif dan eksekutif supaya dihindari.
3. Pembagian belanja pembangunan/modal ke dalam sektor, subsektor dan program selama ini berlaku masih tetap dipakai secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian empiris, maka dari itu penulis mendapatkan dugaan atau kesimpulan awal yang merupakan hasil yang diharapkan penulis. Kesimpulan ini merupakan hubungan antar variabel. Kesimpulan tersebut :

2.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi bersumber dari sektor – sektor perekonomian yang kemudian sektor – sektor ini masuk sebagai pendapatan asli daerah. Contoh sektor – sektor perokoniman tersebut diantaranya berasal dari industri, listrik, gas, hotel, restoran dan lain – lain.

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Modal Daerah ayat 1 berbunyi " Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan “. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “ Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial “, tetapi dalam prakti penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1988; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*. Landasan teoritis dan temuan – temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut :

H1 : pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu ciri dari kemapanan suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangannya. Untuk itu, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksa” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor – sektor yang mendukung kepentingannya.

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi aloksai untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas

penggunaan PAD yang tidak sesuai dengan preferensi publik. Temuan ini menginformasikan pendapat Colombatto (2001). Berdasarkan landasan teoritis dan temuan – temuan di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Dana alokasi umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah yang berperan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah (*equalization grant*), dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Berkaitan dengan itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, formula yang digunakan dalam perhitungan DAU adalah konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri (PDN) bersih, dengan rincian 10 persen untuk provinsi, dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Untuk meningkatkan fungsi utama DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, maka penerapan formula DAU sejak tahun 2003 – 2005 dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2004 alokasi DAU ditingkatkan, yaitu dari 25 persen menjadi 25,5 persen dari PDN bersih.
2. Formula yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan.
3. Tetap mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi minimum/alokasi dasar), yang terdiri dari lumpsum dan proporsional terhadap kebutuhan belanja pegawai.
4. DAU bagi daerah otonom baru (pemekaran) dihitung secara proporsional dari daerah induknya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja PNS daerah.

Berdasarkan konsep celah fiskal, alokasi/distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dalam pasal 45 PP 55/2005 dinyatakan bahwa Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar; Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal; Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif

dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Formula DAU dalam PP 55/2005, seperti yang dijelaskan di atas, digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan Dana Penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

Bedasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holzt-Eakin et.al. (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa *variable – variable* kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *nonlinier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis dan temuan – temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan mulai dari data yang akan diambil sampai dengan metode analisi penelitian ini. Adapun yang dijelaskan pada bagian ini terdiri dari :

3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang ada di Indonesia.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Yogyakarta

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2005 – 2010.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data diperoleh melalui akses internet (download) dari portal Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id) dan Badan Pusat Statistik DIY.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1985), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya.

Menurut Paul A Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yaitu, sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan inovasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Sesuai dengan Undang Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.5.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mulyana, subhan dan slamet, 2006). Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah murni yang diberikan Pemerintah Pusat yang kewenangannya secara penuh di berikan kepada Pemerintah Daerah agar dapat menjadi sumber pendanaan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

3.5.4 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan.

3.6 Hipotesis Operasional

Pada bagian ini hipotesis operasional disusun dalam bentuk formulasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun penyusunan tersebut sebagai berikut :

3.6.1 Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Formulasi hipotesisnya sebagai berikut :

1. $H_{01} = \beta_1 \leq 0$: pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. $H_{a1} = \beta_1 > 0$: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3.6.2 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Formulasi hipotesisnya sebagai berikut :

1. $H_{02} = \beta_2 \leq 0$: pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. $H_{a2} = \beta_2 > 0$: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3.6.3 Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Formulai hipotesisnya sebagai berikut :

1. $H_{03} = \beta_3 \leq 0$: dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. $H_{a3} = \beta_3 > 0$: dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3.7 Metode Analisi Data

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai metode – metode analisi data, antara lain :

3.7.1 Analisis Diskriptif

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran data yang akan dianalisis, adapun langkah – langkah yang dilakukan, yaitu :

3.7.1.1 Rata – rata

Nilai rata – rata dihitung dengan membagi jumlah nilai keseluruhan data dengan jumlah datanya. Nilai rata – rata ini menunjukkan keadaan pada umumnya dari data yang dihadapi. Rumus rata – rata yang biasanya dipakai adalah:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n x}{n}$$

x = Rata - rata

\sum = Jumlah semua nilai

n = Jumlah data

3.7.1.2 Standar Deviasi

Besaran standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data, semakin besar standar deviasinya, maka semakin tersebar pula data tersebut.

Rumus yang dipakai untuk menghitung standar deviasi adalah :

$$x = \frac{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2}}{n(n-1)}$$

x = standar deviasi

n = jumlah data

Σ = total jumlah semua nilai

3.7.1.3 Maximum

Nilai ini menunjukkan nilai tertinggi dari data yang ada.

3.7.1.4 Minimum

Nilai ini menunjukkan nilai terendah dari data yang ada. Bila nilai minimum positif maka peneliti memiliki kebebasan dalam melakukan manipulasi data. Bila nilai negatif, maka peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi logaritma atau akar.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum kita melakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi klasik dahulu. Uji asumsi klasik dapat mengetahui apakah dalam data yang akan kita analisis apakah terjadi masalah seperti datanya tidak berdistribusi normal atau ada masalah pada heteroskedasitas atau multikolonieritas dan autokorelasi. Uji asumsi dasar klasik meliputi :

3.7.2.1 Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

3.7.2.2 Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independennya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari korelasi antar variable independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai toleransi lebih besar dari 10%
- b. Value inflation factor (VIF) kurang dari 10
- c. Nilai koefisien korelasi masing-masing variable independen tidak lebih dari 90%

3.7.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

3.7.2.4 Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Hipotesis

Alat analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan Software Eviews. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut (Sekaran, 2003):

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

e = Error

Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian statistik, yaitu :

Uji t-Statistika

Uji t-statistik dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen secara parsial (individu), uji ini digunakan untuk mengetahui

signifikansi dan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji t tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membuat formulasi hipotesis

1. $H_{01} = \beta_1 \leq 0$: pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. $H_{a1} = \beta_1 > 0$: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.
3. $H_{02} = \beta_2 \leq 0$: pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
4. $H_{a2} = \beta_2 > 0$: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.
5. $H_{03} = \beta_3 \leq 0$: dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
6. $H_{a3} = \beta_3 > 0$: dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2. Menentukan level signifikansi

Yaitu dengan menggunakan α sebesar 5%.

3. Pengambilan keputusan

H_0 ditolak jika P value < 5% dan koefisien regresi variabel independen sesuai dengan yang diprediksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Modal (BM) Pemerintah Provinsi DIY untuk periode tahun 2005-2010. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

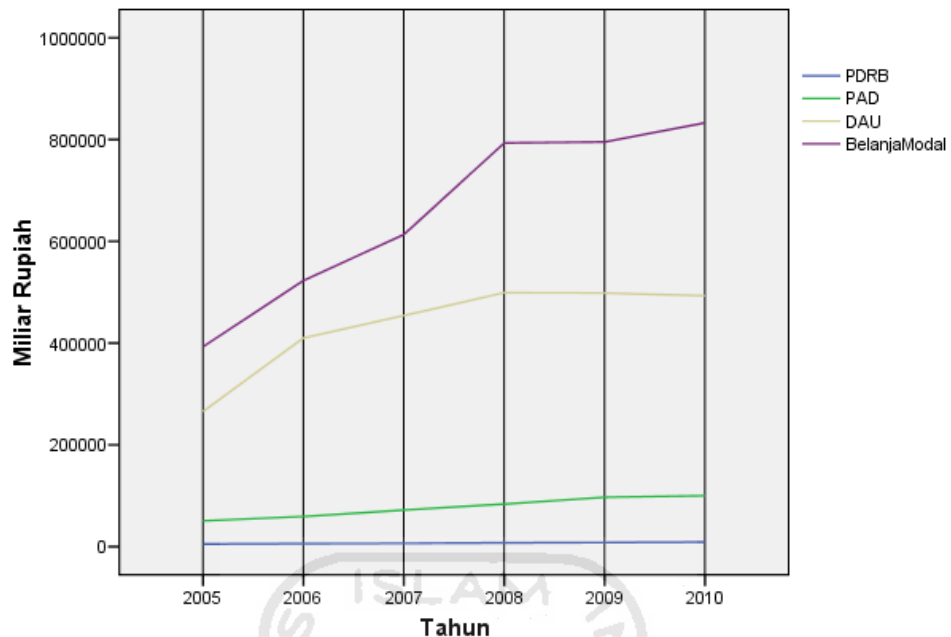
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Selama tahun penelitian dari 2005 – 2010. Kondisi fiskal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal mengalami kenaikan. Umumnya mengalami kenaikan secara berturut-turut, kecuali DAU yang menurun pada tahun 2009 dan 2010 dari tahun sebelumnya 2007. Lihat tabel 4.1 dan gambar 1.

Tabel 4.1. Data Fiskal DIY (Rp. Miliar)

Tahun	PDRB	PAD	DAU	Belanja modal
2005	5,049	50,661	265,448	392,799
2006	5,836	59,228	409,996	522,840
2007	6,505	71,949	454,079	613,319
2008	7,442	83,612	499,015	793,196
2009	8,107	97,044	498,400	795,280
2010	8,928	100,049	492,973	832,812
Rata-rata	6,978	77,090	436,652	658,374

Sumber : Badan Statistik Daerah DIY



Gambar 1. Perkembangan Fiskal DIY

Dilihat secara umum, PDRB memiliki trend yang paling rendah, kemudian PAD dan DAU.

4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

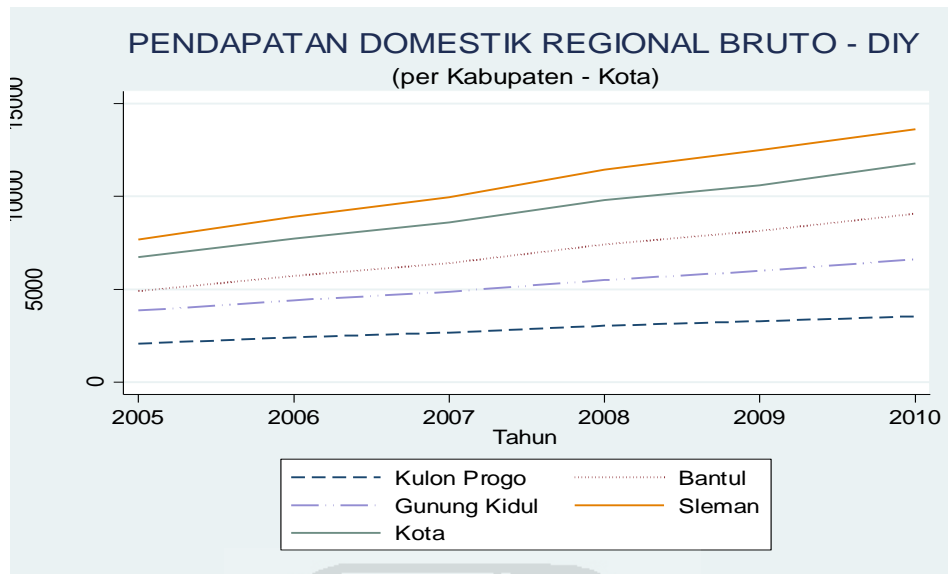
PDRB berbasis pada produk domestik, dari seluruh produksi barang dan jasa serta berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Aktivitas ekonomi tersebut bergerak di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan penggalan industry, pengolahan listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan umum, persewaan dan jasa perusaha – perusahaan. Dalam hal ini PDRB merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Maka meningkatnya PDRB di tiap kabupaten di provinsi DIY mengindikasikan keberhasilan pembangunan dimasing-masing daerah. (Tabel 4.2 dan gambar 2)

Kabupaten Sleman pada tahun 2005 mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp. 7.670 miliar, tertinggi dibandingkan empat wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar Rp. 8.899 miliar, dan akhirnya ditahun 2010 menjadi sebesar Rp. 13.612 miliar. Rival Sleman adalah Kota Yogyakarta, selama tahun 2005 – 2010 selalu berada di bawah Sleman dengan karakteristik yang hampir sama. Terlihat dalam gambar 2, kenaikan PDRB Sleman juga diikuti oleh Kota Yogyakarta, demikian juga penurunannya. Selain kota Yogyakarta, PDRB wilayah lain juga terlihat mengalami peningkatan dengan karakteristik hampir sama.

Tabel 4.2. Perkembangan PDRB Daerah di DIY (Rp. Miliar)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	2,074	4,904	3,855	7,670	6,744
2006	2,415	5,722	4,413	8,899	7,733
2007	2,673	6,410	4,872	9,972	8,599
2008	3,038	7,418	5,502	11,446	9,807
2009	3,286	8,148	5,988	12,504	10,607
2010	3,547	9,076	6,625	13,612	11,778
Rata - rata	2,839	6,946	5,209	10,684	9,211

Sumber : Badan Statistik Daerah DIY



Gambar 2. Perkembangan PDRB di Wilayah DIY

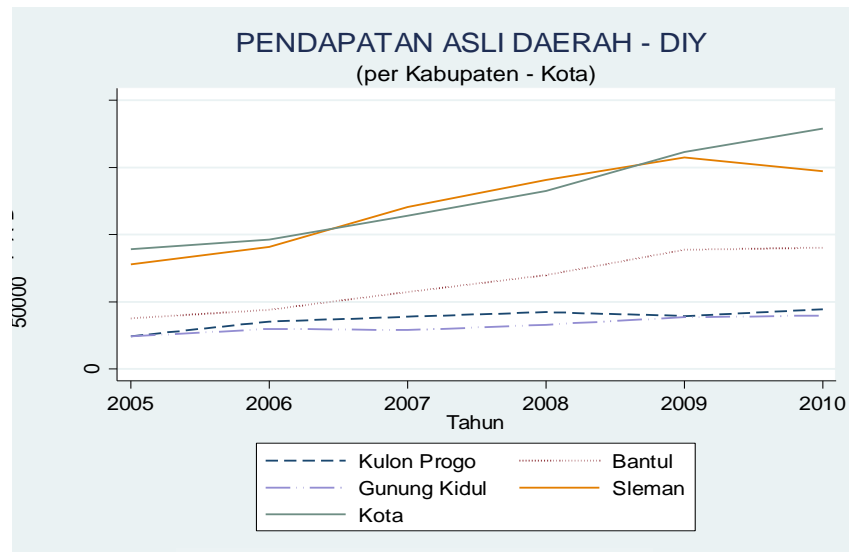
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan PDRB. Berbeda dengan PDRB yang berbasis pada Produksi dan Jasa, PAD berbasis pada potensi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pajak (Daerah, Provinsi, Kabupaten), Retribusi (jasa umum, jasa usaha, peizinan tertentu), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian dari laba perusahaan Daerah, lembaga keuangan, penyertaan modal).

Tabel 4.3. Perkembangan PAD Daerah di DIY (Rp. Miliar)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	24,332	37,684	24,187	77,905	89,196
2006	35,203	44,005	29,801	90,710	96,419
2007	38,883	57,230	28,878	120,657	114,098
2008	42,286	69,801	32,908	140,631	132,432
2009	39,359	88,691	38,455	157,231	161,483
2010	44,417	90,239	39,756	147,073	178,761
Rata - rata	37,413	64,608	32,331	122,368	128,732

Sumber : Badan Statistik Daerah DIY



Gambar 3. Perkembangan PAD di Wilayah DIY

4.1.3 Dana alokasi umum (DAU)

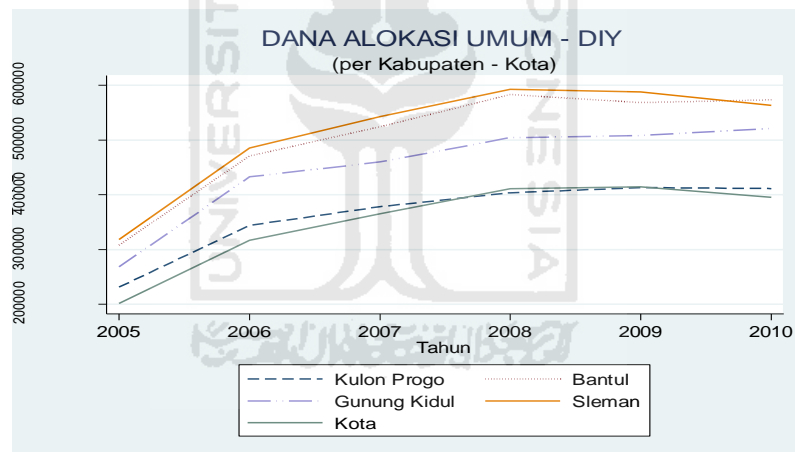
Dua sumber pendanaan sebelumnya yaitu PDRB dan PAD berasal dari masing – masing daerah yang ada di provinsi DIY, sedangkan DAU berasal dari alokasi APBN yang diberikan ke daerah sebagai dana perimbangan agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.

Tahun 2005 – 2008 jumlah DAU di Bantul mengalami kenaikan, kemudian menurun hingga tahun 2010. Gambar 4 di bawah menunjukkan tahun 2008 merupakan puncak DAU di wilayah Bantul. Bantul sebenarnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2010, namun besarnya tetap di bawah 2008. Sedangkan Gunung Kidul dapat dikatakan selalu meningkat. Sedangkan Kulon Progo, Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tiap tahun mengalami kenaikan kecuali di tahun 2010 masing – masing wilayah mengalami penurunan jumlah DAU..

Tabel 4.4. Perkembangan DAU Daerah di DIY (Rp. Miliar)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	231,438	308,106	268,325	318,139	201,231
2006	344,035	470,847	432,868	485,397	316,832
2007	378,145	524,293	459,851	543,065	365,042
2008	403,657	583,169	504,396	592,595	411,257
2009	413,082	568,502	508,212	587,858	414,345
2010	411,294	573,512	521,294	563,321	395,444
Rata - rata	363,609	504,738	449,158	515,063	350,692

Sumber : Badan Statistik Daerah DIY



Gambar 4. Perkembangan DAU di Wilayah DIY

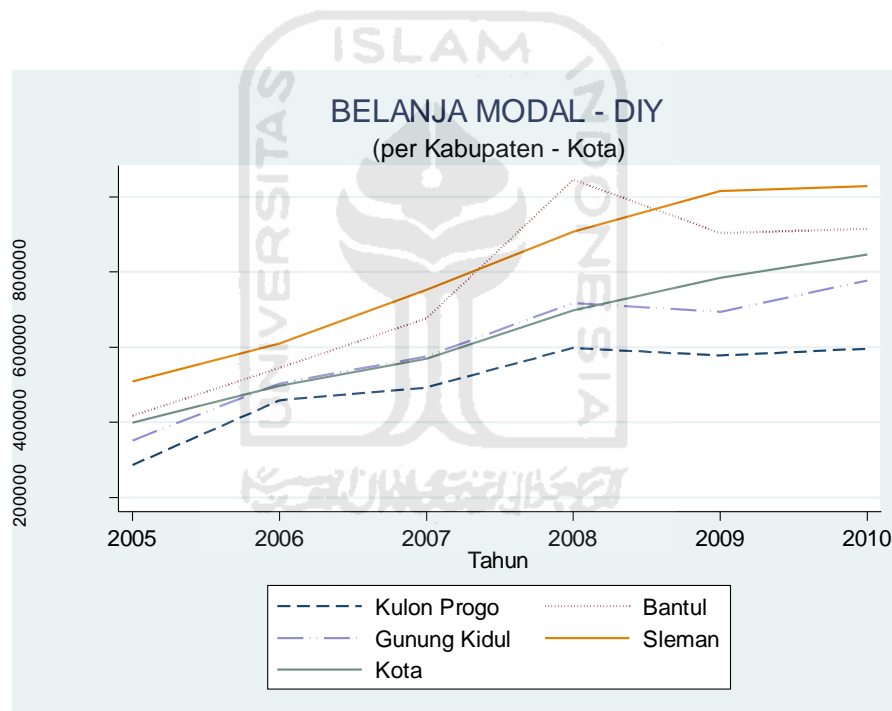
4.1.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan daerah. Besar belanja secara normatif berkaitan dengan kemampuan pendanaan daerah yang bersangkutan. Maka Sleman terlihat lebih besar dari daerah lain, karena dari PDRB, PAD dan DAU memang paling tinggi diantara daerah yang lain.

Tabel 4.5. Perkembangan Belanja Modal di DIY (Rp. Miliar)

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	286,529	417,798	352,144	508,280	399,245
2006	458,910	545,132	503,625	609,765	496,769
2007	492,840	676,835	575,684	752,114	569,120
2008	598,060	1,045,432	717,302	906,619	698,567
2009	577,737	903,767	694,326	1,016,027	784,544
2010	596,292	915,091	776,961	1,028,576	847,138
Rata - rata	501,728	691,725	603,3403	694,1945	632,5638

Sumber : Badan Statistik Daerah DIY



Gambar 5. Perkembangan BELANJA MODAL di Wilayah DIY

Secara umum belanja modal tidak dapat dilihat hanya dari pendapatan yang bersumber dari PDRB, PAD dan DAU. Karena selama tahun 2005 – 2010 jumlah belanja modal selalu lebih tinggi dari jumlah PDRB, PAD dan DAU.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji statistik terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Adapun pengujian yang digunakan adalah Uji Normalitas, Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

4.2.1 Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Peneliti menggunakan uji one-sample kolmogorov-smirnov test.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

One-sample Kolmogorov-Smirnov test against theoretical distribution normal((e-r(mean))/r(sd))			
Smaller group	D	P-value	Corrected
e:	0.1130	0.465	
Cumulative:	-0.0917	0.603	
Combined K-S:	0.1130	0.839	0.781

Dari uji statistik ditemukan bahwa P value 0,839. Oleh karena P value > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.2.2 Multikolinearitas

Multikolinearitas dalam penelitian ini diukur berdasarkan tingkat variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Nilai tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang dipilih yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Nilai tolerance yang dipakai adalah 0,10 atau sama dengan VIF 10. Jika $VIF < 10$ atau nilai tolerance $< 0,1$ maka variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Kesimpulan
PDRB	5,39	0,185	Tidak terjadi multikolinieritas
PAD	4,55	0,219	Tidak terjadi multikolinieritas
DAU	1,41	0,707	Tidak terjadi multikolinieritas

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas tidak terdapat nilai tolerance $< 0,1$ dan mempunyai nilai $VIF < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.

4.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji yang dilakukan menggunakan uji wooldridge test.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

wooldridge test for autocorrelation in panel data			
H0: no first-order autocorrelation			
F(1,	4)	= 0.402
Prob > F	=		0.5606

Dalam uji ini di temukan besarnya probabilitas = 0,5606. Oleh karena probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang terjadi dalam model penelitian tersebut.

4.2.4 Heteroskedastisitas

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji yang dilakukan adalah uji modified wald test.

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Modified wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model	
H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$	
chi² (5) =	6.803363
Prob>chi2 =	0.23568

Dalam uji ini ditemukan nilai probabilitas chi² sebesar 0,23568. Oleh karena nilai prob c² > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Analisa Regresi berganda

Pengaruh PDRB, PAD dan DAU terhadap Belanja Modal tidak dapat dijelaskan dari besar nominalnya. DAU jumlahnya lebih besar dari PDRB dan PAD adalah fakta, namun belum tentu dialokasikan untuk Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah, bahkan bisa jadi pertimbangan belanja modal di dasarkan pada variabel diluar PDRB, PAD dan DAU.

Uraian deskriptif sebelumnya menunjukkan masing-masing daerah memiliki kondisi fiskal yang berbeda sesuai wilayahnya. Umumnya Sleman selalu lebih tinggi, kemudian Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Sehingga dalam pengujian regresi kewilayahan ini harus dipertimbangkan.

Adapun hasil dari pengujian regresi berganda yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi Ganda

Variabel	Koef. Reg	T _{hit}	P value	kesimpulan
Konstanta	-0,502	- 0,68	0,506	
X1 – PDRB	0,518	2,29	0.032	Ha ₁ didukung
X2 –PAD	0,326	1.97	0.062	Ha ₂ didukung
X3 – DAU	0,442	3.92	0.001	Ha ₃ didukung
R square (R ²)	0.677			
F _{hitung}	148,03			
Pvalue	0,000			

Sumber : Hasil pengujian Regresi

Berdasarkan dari hasil dari output komputer melalui program SPSS seperti terlihat pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -0.502 + 0.518PDRB + 0.326PAD + 0.442DAU + e$$

Persamaan ini menjelaskan :

- Jika nilai variabel PDRB meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal sebesar 0,518 satuan.

- Jika nilai variabel PAD meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal sebesar 0,326 satuan.
- Jika nilai variabel DAU meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal sebesar 0,442 satuan.

4.4 Pengujian Hipotesis

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil pengujian untuk masing – masing hipotesis penelitian antara pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui secara detail masing-masing variabel independen pengaruhnya terhadap variabel dependen digunakan pengujian dengan uji t sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian pada variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto seperti pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0,518 dengan probabilitas sebesar 0,032 yang nilainya di bawah tingkat signifikansi yaitu 5% ($p\text{-value} \leq 0,05$). Dengan demikian H_1 yang menyatakan bahwa “ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal “ dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik PDRB maka akan naik juga Belanja Modalnya dan sebaliknya apabila PDRB turun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih tahun 2003, Smith dan Bertozzi tahun 1998, keefer dan khemani tahun 2003, Mauro tahun 1988 dan Von Hagen tahun 2002 yang memberikan kesimpulan dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dalam kaitannya PDRB yang semakin besar akan memberikan kontribusi yang besar pula pada Belanja Modal daerah. Seperti yang diketahui bahwa Belanja Modal ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka besarnya PDRB dalam suatu daerah akan memberikan pengaruhnya pada Belanja Modal itu sendiri.

4.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian pada variabel PAD seperti pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0,326 dengan probabilitas sebesar 0,062 untuk uji dua sisi, sedangkan uji satu sisi p-value adalah $0,062/2$ sebesar 0,03, yang nilainya di bawah tingkat signifikansi yaitu $< 5\%$ ($p\text{-value} \leq 0,05$). Dengan demikian H_2 untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik PAD maka akan ikut naik pula Belanja Modal demikian juga sebaliknya apabila PAD menurun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah tahun 2004 dan Colombatto 2001 yang memberikan kesimpulan dengan pernyataan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

PAD yang dihasilkan akan memberikan pengaruhnya ke Belanja Modal khususnya pada peningkatan pelayanan publik yaitu fasilitas – fasilitas umum dan pelaksanaan pembangunan daerah seperti perawatan jalan dan jembatan, pembangunan dan perawatan gedung pemerintah dan lain – lain.

4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian pada variabel DAU seperti pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi positif sebesar 0,442 dengan probabilitas sebesar 0,001 yang nilainya di bawah tingkat signifikansi yaitu 5% ($p\text{-value} \leq 0,05$). Dengan demikian H_3 untuk variabel independen DAU yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal“ dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik DAU maka akan ikut naik pula Belanja Modal demikian juga sebaliknya apabila DAU menurun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Holzt-Eakin et.al tahun 1985 yang memberikan pernyataan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memberikan pengaruhnya ke Belanja Modal. Apabila daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan yang relatif besar maka DAU yang diberikan nilainya kecil tetapi apabila daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif kecil maka DAU yang diberikan nilainya besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada bab IV dapat disimpulkan bahwa :

1. H_1 yang menyatakan bahwa “ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal “ dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik PDRB maka akan naik juga Belanja Modalnya dan sebaliknya apabila PDRB turun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.
2. H_2 yang menyatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal “ dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik PAD maka akan ikut naik pula Belanja Modal demikian juga sebaliknya apabila PAD menurun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.
3. H_3 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal“ dinyatakan didukung. Yang artinya apabila semakin naik DAU maka akan ikut naik pula Belanja Modal demikian juga sebaliknya apabila DAU menurun maka Belanja Modal akan ikut turun juga.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna.

Hal ini disebabkan masih terdapat keterbatasan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, variabel yang dimasukkan dalam model regresi sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal hanya 3 variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) saja, sementara dimungkinkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal. Hasil adjusted R-square yang sebesar 0,677 berarti model dapat menjelaskan variabel yang mempengaruhi sebesar 67,7 persen dan sisanya sebesar 32,3 persen dijelaskan oleh faktor – faktor lain di luar 3 variabel tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dikemukakan di atas, maka sarann yang diajukan adalah sebagai berikut :

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang mungkin mempengaruhi Belanja Modal, misalnya ukuran – ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus, ataupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah; Pendekatan principal-agent theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu 4 – 5 Oktober 2004.
- Adi, Prio Hari. 2009. *Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya.
- Darwanto dan Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Symposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal ekonomi STIE* No.2/TahunXIII/25.
- Harianto dan Adi. 2007. *Hubungan antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Perkapita*. Symposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Key, V.O. 1940. The lack of budgetary theory. *American political science review* 34 (December) dalam Shafritz, Jay M. & Albert C. Hyde. 1997. *Classics of public administration*. Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mulia Andirfa. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Pemerintah Aceh)*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
- Mulyana, Budi Subhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan daerah (perspektif desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia cetakan Pertama*. Editor Tim LPKPAP.

Oates, Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dilemmas of Decentralization” by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*. Hal : 134 – 139.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 1995. *Ekonomi (edisi terjemahan)*, Edisi kedua belas jilid 2. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan dan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sekaran, Uma. 2003. *Research methods for business : A Skill-Building Approach*, Fouth Edition, New York: John Wiley & Sons.

Sidik, Mahfud, 2002, *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Buku Kompas, Jakarta.

Smith, Robert W. Dan Mark Bertozzi. 1998. Principals and agent : An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.

Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : LPFE UI dengan Bina Grafika.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Pusat*.

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No 32 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No 34 tentang *Pajak Daerah*.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3 Hal : 413 – 423.

Lampiran 1

**Tabel 4.1. Data Variabel Penelitian Wilayah di Provinsi DIY
(Rp. Miliar)**

	Tahun	PDRB	PAD	DAU	Belanja modal
	2005	5,049	50,661	265,448	392,799
	2006	5,836	59,228	409,996	522,840
	2007	6,505	71,949	454,079	613,319
	2008	7,442	83,612	499,015	793,196
	2009	8,107	97,044	498,400	795,280
	2010	8,928	100,049	492,973	832,812
	Rata-rata	6,978	77,090	436,652	658,374



Lampiran 2

**Tabel 4.2. Variabel PDRB Daerah di Provinsi DIY
(Rp. Miliar)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	2,074	4,904	3,855	7,670	6,744
2006	2,415	5,722	4,413	8,899	7,733
2007	2,673	6,410	4,872	9,972	8,599
2008	3,038	7,418	5,502	11,446	9,807
2009	3,286	8,148	5,988	12,504	10,607
2010	3,547	9,076	6,625	13,612	11,778
Rata - rata	2,839	6,946	5,209	10,684	9,211

**Tabel 4.3. Variabel PAD Daerah di Provinsi DIY
(Rp. Miliar)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	24,332	37,684	24,187	77,905	89,196
2006	35,203	44,005	29,801	90,710	96,419
2007	38,883	57,230	28,878	120,657	114,098
2008	42,286	69,801	32,908	140,631	132,432
2009	39,359	88,691	38,455	157,231	161,483
2010	44,417	90,239	39,756	147,073	178,761
Rata - rata	37,413	64,608	32,331	122,368	128,732

**Tabel 4.4. Variabel DAU Daerah di Provinsi DIY
(Rp. Miliar)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	231,438	308,106	268,325	318,139	201,231
2006	344,035	470,847	432,868	485,397	316,832
2007	378,145	524,293	459,851	543,065	365,042
2008	403,657	583,169	504,396	592,595	411,257
2009	413,082	568,502	508,212	587,858	414,345
2010	411,294	573,512	521,294	563,321	395,444
Rata - rata	363,609	504,738	449,158	515,063	350,692

Lampiran 3

**Tabel 4.5. Variabel Belanja Modal di Provinsi DIY
(Rp. Miliar)**

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2005	286,529	417,798	352,144	508,280	399,245
2006	458,910	545,132	503,625	609,765	496,769
2007	492,840	676,835	575,684	752,114	569,120
2008	598,060	1,045,432	717,302	906,619	698,567
2009	577,737	903,767	694,326	1,016,027	784,544
2010	596,292	915,091	776,961	1,028,576	847,138
Rata - rata	501,728	691,725	603,3403	694,1945	632,5638

Keterangan :

- Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Sumber utama Pertumbuhan Ekonomi berasal dari Produk Regional Domestik Bruto (PDRB).
- PAD adalah pendapatan daerah yang berumber dari potensi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.
- DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah.
- Belnaja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada daerah.

Lampiran 4

Hasil Analisis Regresi Berganda.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas
 One-sample Kolmogorov-Smirnov test against theoretical distribution
 normal((e-r(mean))/r(sd))

Smaller group	D	P-value	Corrected
e:	0.1130	0.465	
Cumulative:	-0.0917	0.603	
Combined K-S:	0.1130	0.839	0.781

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Kesimpulan
PDRB	5,39	0,185	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	4,55	0,219	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	1,41	0,707	Tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi
 Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation		
F(1,	4) =	0.402
Prob > F =		0.5606

Lampiran 5

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

$H_0: \sigma(i)^2 = \sigma^2$

$\chi^2 (5) = 6.803363$

$\text{Prob} > \chi^2 = 0.23568$

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi Ganda

Variabel	Koef. Reg	T_{hit}	P value	kesimpulan
Konstanta	-0,502	- 0,68	0,506	
X1 – PDRB	0,518	2,29	0.032	Ha ₁ didukung
X2 –PAD	0,326	1.97	0.062	Ha ₂ didukung
X3 – DAU	0,442	3.92	0.001	Ha ₃ didukung
R square (R ²)	0.677			
F _{hitung}	148,03			
Pvalue	0,000			